

SKRIPSI

**SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



Oleh:
ROLANDY ALEXANDER CAROLES

NIM	19051076
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Ketatanegaraan

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

SKRIPSI

**SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



Oleh:
ROLANDY ALEXANDER CAROLES

NIM	19051076
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Ketatanegaraan

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Nama : Rolandy Aleksander Caroles

NIM 19051076

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Ketatanegaraan

Telah diuji dalam sidang skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 September 2023

Manado, 4 Agustus 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Ketua Program Studi

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan

Helena B. Tambajong, S.I.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Diajukan oleh:

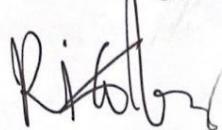
Rolandy Aleksander Caroles

19051076

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

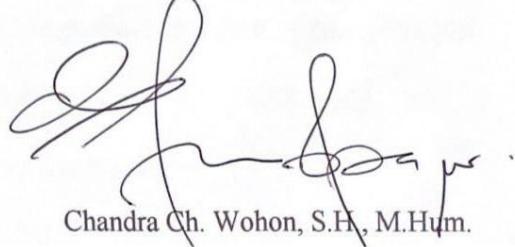
Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Pembimbing Utama



Dr. Rietha Lontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.

MOTTO

**IF GOD MAKE A DECISION, BROKEN HOME IS NOT A
REASON TO NOT BE SUCCESFULL.**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK OPA, OMA, MAMA, PAPA,
DAN ADIK, SERTA SEMUA ORANG TERKASIH YANG SENASTIASA
TERUS MENDUKUNG DAN MEMBANTU SAYA.

PERSYARATAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rolandy Aleksander Caroles

NIM : 19051076

Judul Skripsi : Sistem *Presidential Treshold* dalam Pencalonan Presiden

dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupu plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik ataupun sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan



Rolandy Aleksander Caroles

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya, penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem *Presidential Threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mengerjakan skripsi pada program S1 di Jurusan Hukum Ketatanegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle.

Peneliti menyadari bahwa dalam Menyusun skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak. Karena itu pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Akademik .

6. Dr. Rietha Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulisan skripsi;
7. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulisan skripsi;
8. Seluruh Dosen Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Papa, Mama, Oma, Opa dan seluruh keluarga yang selalu membantu dalam doa, serta memberi motivasi kepada penulis.
10. Teman Julio Tololiu, Monitha Kaunang, dan Agnes Birahim yang berjuang bersama serta saling menginspirasi satu dengan yang lain.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu per satu.

Sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun bahasa. Oleh karena itu peneliti sangat menerima kritik dan saran guna kemajuan dari peneliti agar lebih baik kedepannya. Peneliti juga berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi manfaat bukan hanya kepada peneliti tetapi kepada semua juga yang membaca skripsi dari peneliti.

Manado, 4 Agustus 2023



Rolandy Aleksander Caroles

ABSTRACT

Rolandy Aleksander Caroles, 2023, **THE PRESIDENTIAL THRESHOLD SYSTEM IN THE NOMINATION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REVIEWED FROM LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS.** Supervised by: Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. and Chandra Ch. Wohon, S.H., M. Hum.

The presidential threshold is a rule that regulates the conditions for carrying out presidential and vice-presidential nomination in Indonesia. Legal rules related to elections are regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. The purpose of this research was to determine the effectiveness of implementing the Presidential Threshold in the nomination of President and Vice President in Indonesia and also to determine the steps to justify the Presidential Threshold in the nomination of President and Vice President of the Republic of Indonesia in terms of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research method used was normative juridical legal research which is basically carried out through a literature study which examines written laws from the perspective of theory, history, philosophy, comparison, etc. The results of the discussion from the research showed that the fundamentals of the Presidential Threshold system limit the nomination of President and Vice President to 20% of seats and 25% of the national vote. Changes to the Presidential Threshold continued to develop from 2004 to 2019. Starting from 15% of the number of seats and 20% of the vote to 20% of the number of seats and 25% of the vote. The Presidential Threshold is a requirement for someone to become President and Deputy President. The Presidential Threshold system cannot be based on vote acquisition because this reflects parliamentary Presidential Threshold Practice. Fundamentally, the Presidential Threshold system limits the nomination for President and Vice President to 20% of seats and 25% of the national vote. The Presidential Threshold system is not only regulated in the Lex Generalis but also in the Lex Superior, in this case the constitution.

Keywords: Election, Presidential Threshold, System

ABSTRAK

Rolandy Aleksander Caroles, 2023, **SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.**

Dibimbing oleh : Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H. dan Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.

Presidential threshold merupakan suatu kaidah yang mengatur terkait syarat-syarat dalam pelaksanaan pencalonan presiden serta wakil presiden di Indonesia. Aturan hukum terkait pemilu diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan *Presidential Threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta juga untuk mengetahui langkah justifikasi Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative yang pada dasarnya dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filsafat, perbandingan, dan lain-lain. Hasil pembahasan dari penelitian yaitu fundamental sistem *Presidential Threshold* membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. Perubahan Presidential Threshold terus mengalami perkembangan sejak tahun 2004 sampai 2019. Mulai dari 15% jumlah kursi dan 20% perolehan suara menjadi 20% jumlah kursi dan 25% jumlah suara. Presidential Threshold adalah syarat seseorang bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sistem Presidential Threshold tidak dapat didasarkan pada perolehan suara karena hal tersebut mencerminkan Praktik Presidential Threshold secara parlementer. Secara fundamental sistem Presidential Threshold membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. sistem Presidential Threshold bukan hanya diatur dalam Lex Generalis melainkan juga dalam Lex Superior, dalam hal ini adalah konstitusi.

Kata Kunci : Pemilu, *Presidential Treshold*, Sistem

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Sistem.....	8
B. <i>Presidential threshold</i>	10
C. Pemilihan Umum	11
D. Presiden	14
E. Wakil Presiden	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data.....	21
C. Metode Pengumpulan Data	21
D. Metode Analisis Data	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Efektivitas Penerapan Sistem <i>Presidential Threshold</i> dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	23
B. Langkah Justifikasi <i>Presidential Threshold</i> dalam pencalonan Presiden	

dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	30
BAB V PENUTUP.....	DAFTAR ISI.....
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	

